

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pada fase usia dini, anak mengalami perkembangan yang sangat pesat baik secara kognitif, sosial-emosional, bahasa, maupun motorik, sehingga kualitas stimulasi dan pengalaman belajar yang diberikan pada tahap ini akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesiapan belajar, karakter, serta kapasitas individu di masa selanjutnya.¹ Berbagai kajian menunjukkan bahwa investasi pendidikan pada usia dini memberikan *return* sosial yang tinggi karena berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan pada jenjang berikutnya dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.² Oleh karena itu, kualitas layanan pendidikan PAUD menjadi faktor penentu dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Dalam konteks tersebut, guru PAUD memiliki peran strategis sebagai aktor utama yang secara langsung berinteraksi dengan anak dalam proses pembelajaran. Guru PAUD tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga merancang lingkungan belajar yang aman, stimulatif, dan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini.³ Dengan peran yang demikian kompleks, peningkatan kompetensi guru PAUD merupakan kebutuhan yang bersifat mendesak dan berkelanjutan, seiring dengan dinamika kebijakan pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntutan pembelajaran abad ke-21.

Secara yuridis, pengembangan kompetensi pendidik telah diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 20

¹ Arifudin, Opan, et al (2021). Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. CV. Widina Media Utama., hlm. 1

² Urgensi Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Tumbuh Kembang Anak. (2023). *Plamboyan Edu*, 1(1), hlm. 38. doi: <https://jurnal.rakeyansantang.ac.id/plamboyan/article/view/320>

³ Alamin, Z., Lukman, L., Missouri, R., Annafi, N., Mutmainah, S., Khairunnas, K., & Fathir, F. (2023). Pelatihan Guru PAUD dalam Penggunaan Aplikasi Edukasi Interaktif untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran. *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), hlm. 46. doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/taroa.v2i1.2616>

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan, termasuk kewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan.⁴ Ketentuan tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru wajib memiliki dan mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.⁵ Dengan demikian, pengembangan kompetensi guru tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan personal, melainkan sebagai kewajiban profesional yang harus difasilitasi oleh negara melalui kebijakan yang terencana.

Dalam konteks pendidikan anak usia dini, tuntutan terhadap kompetensi guru PAUD semakin kompleks seiring dengan perubahan paradigma pembelajaran dan kebijakan kurikulum nasional. Guru PAUD dituntut untuk mampu menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak, mengintegrasikan nilai-nilai karakter, serta memfasilitasi pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi sejak usia dini. Organisasi internasional seperti UNESCO dan OECD menekankan bahwa kualitas layanan PAUD sangat bergantung pada kualitas pendidik, khususnya dalam hal kemampuan pedagogis, refleksi profesional, serta kesiapan dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi.⁶ Oleh karena itu, kebijakan pengembangan kompetensi guru PAUD perlu dirancang secara adaptif, berbasis kebutuhan, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.

⁴ Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

⁵ Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*.

⁶ UNESCO Asia-Pacific Bureau for Education. (2010). *Early childhood care and education: Building the foundation for lifelong learning and the future of the nations of Asia and the Pacific*. UNESCO.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program pengembangan kompetensi guru secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu bentuk intervensi kebijakan yang dikembangkan adalah Program Pelatihan Teknis Non Gelar, yang dirancang sebagai alternatif pengembangan kompetensi di luar jalur pendidikan formal berjenjang. Program pelatihan ini bertujuan untuk memberikan penguatan kompetensi teknis dan profesional guru secara lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lapangan, tanpa harus melalui proses pendidikan formal jangka panjang.⁷

Direktorat Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Kemendikdasmen sebagai unit kerja di tingkat pusat memiliki mandat strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan pengembangan kompetensi guru PAUD dan PNF. Salah satu kebijakan yang dijalankan adalah Program Pelatihan Teknis Non Gelar (PTNG), yang tidak hanya diposisikan sebagai kegiatan pelatihan teknis, tetapi sebagai instrumen kebijakan negara dalam pengembangan sumber daya manusia pendidik nasional. Program ini merupakan program strategis lintas lembaga yang melibatkan Direktorat Guru PAUD dan PNF, perguruan tinggi mitra (termasuk perguruan tinggi internasional), serta didukung oleh pendanaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), sehingga mencerminkan komitmen negara dalam peningkatan mutu dan daya saing guru PAUD secara berkelanjutan. Program ini dirancang sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat kapasitas pendidik dalam menghadapi tantangan pendidikan global dan perkembangan teknologi pendidikan.⁸

Program Pelatihan Teknis Non Gelar mencakup berbagai skema pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pendidikan kontemporer, antara lain pendekatan pembelajaran *STEAM* di PAUD, pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) di PAUD, serta integrasi *soft skills* dalam

⁷ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. *Program Pelatihan Teknis Non-Gelar jenjang PAUD dan PNF*. 2025 (<https://gurupaudpnf.kemendikdasmen.go.id/program/pelatihan-teknis-non-gelar>), Diunduh tanggal 22 Desember 2025 pukul 22.00 WIB.

⁸ *Ibid.*

pembelajaran pendidikan nonformal. Melalui skema pelatihan tersebut, pendidik diharapkan mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, refleksi, serta penguatan karakter peserta didik melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan inovatif. Sasaran program ini meliputi guru PAUD, pamong belajar, tutor, serta tenaga kependidikan lain yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan layanan PAUD.⁹

Pelaksanaan Program Pelatihan Teknis Non Gelar dilakukan melalui serangkaian tahapan seleksi yang meliputi seleksi administrasi, seleksi wawancara, hingga penetapan penerima beasiswa. Tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa peserta yang mengikuti program memiliki kesiapan akademik, kemampuan komunikasi, serta pemahaman substansi pelatihan yang memadai.¹⁰ Meskipun Program Pelatihan Teknis Non Gelar (PTNG) dirancang sebagai program strategis nasional, hingga saat ini belum ditemukan informasi mengenai pelaksanaan evaluasi program yang komprehensif dan sistematis, khususnya pada jenjang PAUD. Terdapat dugaan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah potensi permasalahan, antara lain kemungkinan adanya keterbatasan mekanisme monitoring yang terstruktur, serta belum terukurnya capaian hasil langsung (*output*) program secara sistematis dan berbasis indikator yang jelas. Kondisi tersebut berpotensi menghambat optimalisasi fungsi program sebagai instrumen peningkatan mutu guru PAUD. Oleh karena itu, evaluasi program diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara tujuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan hasil langsung yang dicapai oleh program PTNG.

Dalam perspektif manajemen pendidikan, keberhasilan suatu program pelatihan tidak hanya diukur dari keterlaksanaan kegiatan atau jumlah peserta yang terlibat, tetapi juga dari kesesuaian antara kebutuhan pengembangan kompetensi, desain program, ketersediaan input pendukung,

⁹ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2024). *Dokumen Program Pelatihan Teknis Non Gelar Direktorat Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal*.

¹⁰ *Ibid.*

kualitas proses pelaksanaan, serta hasil yang dicapai.¹¹ Tanpa pengelolaan yang terencana dan sistematis, program pelatihan berpotensi menjadi kegiatan administratif yang kurang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan program menjadi aspek krusial dalam menentukan efektivitas kebijakan pengembangan kompetensi guru.

Secara akademik, berbagai penelitian mengenai pelatihan guru PAUD telah dilakukan dengan beragam pendekatan dan fokus kajian. Sebagian besar penelitian tersebut menyoroti persepsi peserta terhadap pelatihan, tingkat kepuasan, atau perubahan kompetensi individu setelah mengikuti pelatihan.¹² Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan gambaran penting mengenai dampak pelatihan pada level individu, analisis yang menempatkan pelatihan sebagai kebijakan publik yang dirancang, dikelola, dan dikendalikan di tingkat pusat masih relatif terbatas. Padahal, sebagai kebijakan nasional, Program Pelatihan Teknis Non Gelar memerlukan evaluasi yang komprehensif untuk menilai kualitas kebijakan dan efektivitas manajerialnya.

Evaluasi program pendidikan memiliki fungsi strategis dalam mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan. Stufflebeam menegaskan bahwa tujuan utama evaluasi bukanlah untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan program, melainkan untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dalam meningkatkan mutu dan keberlanjutan program.¹³ Model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) menawarkan kerangka evaluasi yang komprehensif karena memungkinkan penilaian terhadap kesesuaian konteks kebijakan, kecukupan input, kualitas proses pelaksanaan, serta hasil langsung yang dicapai oleh program.¹⁴

¹¹ Nur Efendi, & Muh Ibnu Sholeh. (2024). Manajemen Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Academicus: Journal of Teaching and Learning*, 2(2), hlm. 73. doi: <https://doi.org/10.59373/academicus.v2i2.25>

¹² Eliza, Delfi, et al. (2022) "Jenis-Jenis Pelatihan Peningkatan Profesional Guru PAUD di Indonesia." *Jurnal Basicedu*, vol. 6, no. 4, hlm. 6842, doi: [10.31004/basicedu.v6i4.3055](https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3055).

¹³ Stufflebeam, D. L. & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation Theory, Models, and Applications*. San Francisco: Jossey-Bass.

¹⁴ *Ibid.*

Mengingat luasnya cakupan Program Pelatihan Teknis Non Gelar yang melibatkan berbagai jenjang pendidikan, skema pelatihan, serta mitra lembaga, penelitian ini menetapkan batasan evaluasi yang jelas. Evaluasi difokuskan pada Program Pelatihan Teknis Non Gelar jenjang PAUD, dengan cakupan analisis meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta hasil langsung (*output*) program. Penelitian ini tidak mengevaluasi dampak jangka panjang (*outcome* maupun *impact*) program terhadap kinerja guru atau mutu layanan PAUD di satuan pendidikan, melainkan dibatasi pada hasil langsung yang dapat diamati dalam konteks implementasi program sesuai dengan ruang lingkup evaluasi kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, evaluasi Program Pelatihan Teknis Non Gelar Jenjang PAUD di Direktorat Guru PAUD dan PNF Kemendikdasmen menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran evaluatif yang utuh mengenai mutu program sebagai kebijakan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian evaluasi kebijakan pendidikan, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan berbasis temuan empiris yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan program pelatihan guru PAUD di masa mendatang.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu mengenai Program Pelatihan Teknis Non Gelar Jenjang PAUD di Direktorat Guru PAUD dan PNF Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Adapun sub fokus penelitian :

1. Evaluasi konteks Program Pelatihan Teknis Non Gelar Jenjang PAUD
2. Evaluasi input Program Pelatihan Teknis Non Gelar Jenjang PAUD
3. Evaluasi proses Program Pelatihan Teknis Non Gelar Jenjang PAUD
4. Evaluasi hasil langsung (*output*) Program Pelatihan Teknis Non Gelar Jenjang PAUD

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana hasil evaluasi konteks Program Pelatihan Teknis Non Gelar Jenjang PAUD di Direktorat Guru PAUD dan PNF Kemendikdasmen ditinjau dari kesesuaiannya dengan kebijakan nasional serta kebutuhan pengembangan kompetensi guru PAUD?
2. Bagaimana hasil evaluasi input Program Pelatihan Teknis Non Gelar Jenjang PAUD di Direktorat Guru PAUD dan PNF Kemendikdasmen yang meliputi kesiapan sumber daya manusia pelaksana dan kurikulum pelatihan?
3. Bagaimana hasil evaluasi proses Program Pelatihan Teknis Non Gelar Jenjang PAUD di Direktorat Guru PAUD dan PNF Kemendikdasmen ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan, serta mekanisme monitoring program?
4. Bagaimana hasil evaluasi hasil langsung (*output*) Program Pelatihan Teknis Non Gelar Jenjang PAUD di Direktorat Guru PAUD dan PNF Kemendikdasmen ditinjau dari ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan?

D. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Program Pelatihan Teknis Non Gelar Jenjang PAUD di Direktorat Guru PAUD dan PNF Kemendikdasmen berdasarkan komponen *Context, Input, Process*, dan *Product* (CIPP).

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian evaluasi kebijakan pendidikan, khususnya dalam konteks evaluasi program pengembangan kompetensi guru sebagai bagian dari kebijakan nasional. Selain itu, penelitian ini memperkuat penerapan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dalam mengevaluasi Program

Pelatihan Teknis Non Gelar pada level kebijakan, sehingga dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model evaluasi program pelatihan pendidikan di tingkat nasional. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji evaluasi program pengembangan kompetensi guru dengan pendekatan evaluatif.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Direktorat Guru PAUD dan PNF Kemendikdasmen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran evaluatif mengenai pelaksanaan Program Pelatihan Teknis Non Gelar jenjang PAUD, khususnya pada aspek konteks kebijakan, kesiapan input, proses pelaksanaan, serta capaian hasil langsung program. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan refleksi dan pertimbangan dalam penyempurnaan pelaksanaan program serta penguatan praktik monitoring dan evaluasi program pelatihan guru PAUD di lingkungan Direktorat Guru PAUD dan PNF.

b) Bagi Pengelola Program Pelatihan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluatif untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan, termasuk penyesuaian kurikulum, strategi pelaksanaan, serta mekanisme monitoring agar lebih efektif dan akuntabel.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris dan metodologis dalam penelitian evaluasi program pendidikan, khususnya penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif dan model CIPP pada konteks program pelatihan di tingkat kebijakan nasional.